

BAB I

PENDAHULUAN

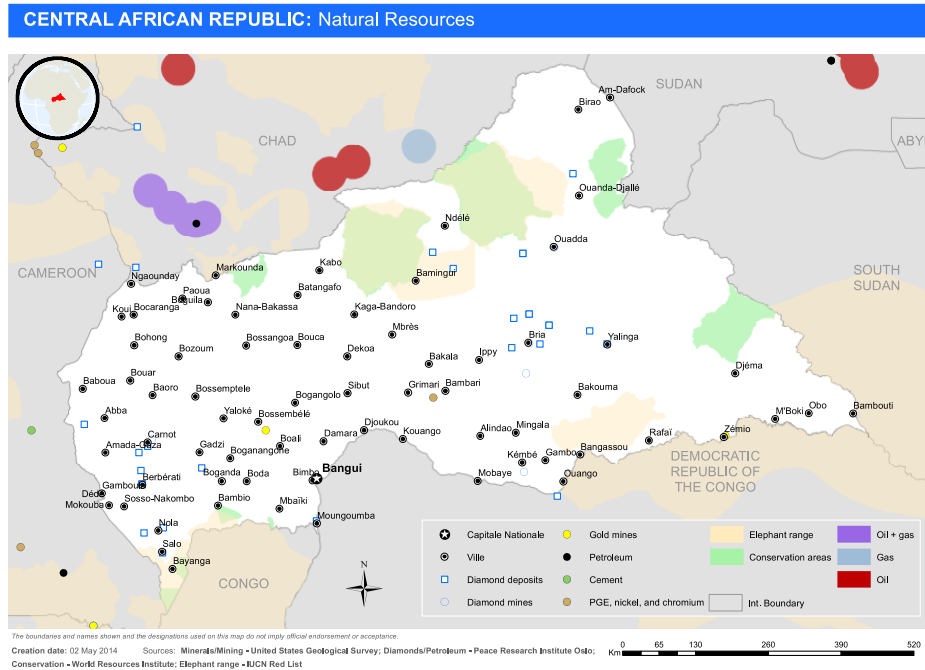
1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir, Rusia semakin gencar untuk menyebarkan pengaruhnya di benua Afrika, salah satunya di Republik Afrika Tengah (CAR). Rusia yang terlihat semakin terlibat dalam Republik Afrika Tengah ini telah menarik banyak perhatian, sehingga bisa mendorong komunitas internasional menaruh perhatian terhadap Rusia atas intervensi dan juga ketentuannya di dalam Republik Afrika Tengah. Namun setelah di teliti lebih lanjut, semakin jelas bahwa aktivitas Rusia di Republik Afrika Tengah memberikan manfaat terhadap kepentingan Rusia, sangat berbeda pada saat awal dari kedatangan Rusia yang tampaknya ingin memberi bantuan (Goodison, 2019).

Sebelum Rusia datang untuk memberikan bantuan, kondisi di Republik Afrika Tengah sudah tidak baik. Di bawah bayang bayang penjajahan Perancis, Republik Afrika Tengah baru menjadi negara merdeka pada tahun 1960. Setelah 5 tahun dari kemerdekaannya, presiden pertamanya digulingkan oleh panglima militer yang juga mendeklarasikan dirinya akan menjadi Presiden seumur hidup, dengan peralihan kekuasaan ini yang menjadi pertanda bahwa Republik Afrika Tengah memasuki era kekacauan politik yang ekstrem dan berlanjut hingga saat ini. Lalu pada tahun 2013, terjadi kudeta yang dilakukan oleh Seleka (Pemberontak yang beragama Islam) yang berlangsung di negara yang bermayoritas kristen itu (Goodison, 2019).

Pada tahun 2014, anti Balaka militia (Pemberontak yang beragama kristen) bersitegang dengan Seleka (pemberontak yang beragama Muslim) dan akhirnya bangkit dan dapat menekan pemberontak Seleka lalu menyerahkan kekuasaan tersebut kepada pemerintah transisi. Delapan bulan setelah kudeta yang dilakukan oleh Seleka pada tahun 2013, Dewan Keamanan PBB menyetujui untuk mengerahkan “pasukan penjaga perdamaian” yang juga mendukung pasukan Prancis (Operasi Sangaris) dan Uni Afrika yang sudah berada di lapangan. Dengan kondisi yang berlanjut pada akhirnya meninggalkan dampak buruk kepada masyarakat. Lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Perpindahan yang terjadi ini juga berdampak kepada keselamatan dari warga Republik Afrika Tengah dan juga mengganggu stabilitas negara sekitar seperti Kamerun, Chad, Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo dan juga Kongo (*Violence as a condition v2*, n.d.)

Dampak lain yang harus dihadapi oleh penduduk Republik Afrika Tengah adalah kerawanan pangan, Republik Afrika Tengah menghadapi ambang kelaparan yang parah. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pembangunan infrastruktur yang tentunya menghalangi penduduk untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Meskipun Republik Afrika Tengah kaya akan emas, berlian dan juga berbagai mineral tanah lainnya, 75% masyarakat masih bergantung dengan pertanian untuk mendapatkan penghasilan tanpa bisa memanfaatkan sumber daya alam lain yang sudah tersedia di Republik Afrika Tengah karena keterbatasan teknologi. (*Violence as a condition v2*, n.d.)



Gambar 1. 1 lokasi tambang di Republik Afrika Tengah
Sumber: (Reliefweb, 2014)

Gambar 1.1 diatas menunjukkan persebaran dari sumber daya alam di Republik Afrika Tengah. Dengan banyaknya konflik terutama di daerah-daerah yang mempunyai banyak sumber daya alam pada akhirnya Pasukan perdamaian PBB mengerahkan hingga 12.000 pasukan untuk menjaga akan terjadinya kekerasan yang berlanjut dan berhasil menekan sedikit kekerasan sehingga Republik Afrika Tengah bisa melakukan pemilu yang dimenangkan oleh Faustin Archange Touadéra pada tahun 2016. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena kondisi di Republik Afrika tengah semakin memburuk hingga menempatkan pada posisi 188 dari 189 negara dari Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan karena 75% wilayah negara berada dibawah kendali 14 kelompok pemberontak yang berbeda. Dengan situasi seperti ini Pasukan Perdamaian PBB dianggap gagal menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (*Violence_as_a_condition_v2*, n.d.).

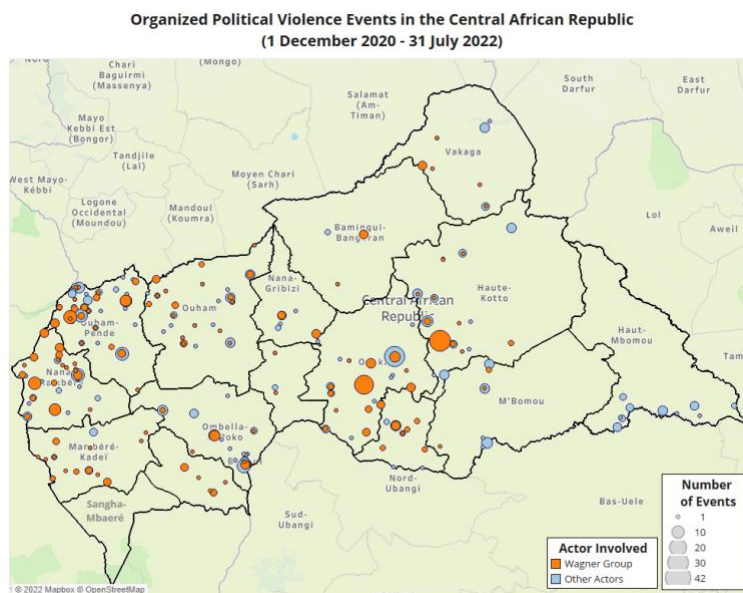
Pada masa krusial ini, Dalam menanggapi krisis keamanan yang berkepanjangan dan keterbatasan intervensi internasional yang ada, Republik Afrika Tengah secara resmi meminta bantuan militer dari Federasi Rusia pada tahun 2017. Permintaan ini dibuat dalam konteks

kebutuhan mendesak CAR untuk menstabilkan situasi keamanan internalnya di tengah meningkatnya kekerasan dan kelompok-kelompok bersenjata yang terpecah belah. Permohonan tersebut membuat Rusia mendapatkan pengecualian dari embargo senjata PBB, yang memungkinkan pengiriman senjata dan pengerahan pelatih militer ke Republik Afrika Tengah untuk melatih anggota militer FACA (Central African Armed Forces). Permintaan resmi ini menandai dimulainya hubungan keamanan bilateral, yang membedakannya dari intervensi sepihak atau operasi rahasia. Otorisasi yang didokumentasikan oleh Dewan Keamanan PBB semakin melegitimasi kehadiran Rusia, meskipun sifat dan cakupan keterlibatan Rusia berkembang secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya (United Nations Committee, 2018).

Dengan melakukan intervensi di Republik Afrika Tengah, Rusia memperoleh prestise internasional. Rusia mendapatkan keuntungan dengan memenuhi permintaan Dewan Keamanan PBB mengenai impor senjata. Di sisi lain, Rusia berencana untuk menyuplai senjata dan menyimpannya dalam wadah yang baru dengan pengamanan yang ketat, serta dilengkapi dengan nomor seri untuk setiap unit sehingga dapat dilacak jika jatuh ke tangan yang salah. Pada bulan Agustus tahun 2018, Republik Afrika Tengah menandatangani penyuplaian senjata dan juga pelatihan militer oleh Rusia (International Crisis Group, 2019).

Keterlibatan Rusia diakui sah secara internasional karena mematuhi peraturan untuk mengamankan dan juga melacak senjata, namun hal tersebut tidak diawasi secara langsung oleh Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut dikarenakan keterlibatan Rusia di dalam Republik Afrika Tengah tidak berdasarkan mandat serta resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Di situasi ini, Rusia memiliki kebebasan yang lebih besar untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Di dalam penerapannya, Rusia menerjunkan pasukan *private military* yang berasal dari kelompok Wagner sebanyak 500 orang untuk menertibkan pasukan pemberontak yang ada

di 2018. Dua tahun kemudian di tahun 2021, terdapat estimasi 1.200-2.000 orang dari Wagner Group yang bertugas di Republik Afrika Tengah (Osborn Lou & Zufferey Dimitri, 2023).



Pada gambar 1.2, terlihat jelas persebaran dari Grup Wagner melalui konflik-konflik yang ditangani atau konflik dari Grup Wagner itu sendiri. Keterlibatan Grup Wagner di Republik Afrika Tengah mencerminkan pola yang lebih luas dari perang perang proksi modern. Dimana negara-negara menggunakan aktor militer non negara untuk memajukan kepentingan strategis agar bisa menyangkal atas apa yang telah dilakukan. Sebagai paramiliter yang memiliki hubungan secara langsung pada Rusia, Wagner tidak hanya beroperasi sebagai perusahaan militer swasta, akan tetapi juga sebagai perpanjangan tangan kebijakan luar negeri Rusia. Melalui bantuan militer, ekstraksi sumber daya dan pengaruh politik, wagner berfungsi sebagai alat proksi yang memungkinkan Rusia untuk memperluas jangkauan geopolitiknya di afrika tanpa intervensi militer secara langsung. Penelitian ini mengeksplorasi peran Wagner sebagai kerangka perang proksi, meneliti bagaimana operasinya di Republik Afrika Tengah.

Kehadiran Wagner di Republik Afrika Tengah juga semakin kuat antara tahun 2022 dan 2023. Wagner terus memberikan bantuan militer langsung kepada pasukan pemerintah,

terutama selama operasi melawan organisasi pemberontak. Wagner meningkatkan perannya di sektor keamanan negara pada saat yang sama mengambil alih inisiatif pelatihan, operasi pertambangan dan infrastruktur strategis. Kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia dan ketergantungan rezim CAR terhadap pasukan Wagner juga meningkat. Wagner menjadi sasaran sanksi dan juga pengawasan internasional. Meskipun begitu, Wagner tetap terus menjadi komponen kunci dari strategi politik dan militer pemerintah CAR.

Dari sekian banyak literatur yang ada, Literatur yang membahas mengenai Perusahaan Militer Swasta (PMC) cenderung berfokus pada status hukum, perilaku operasional, atau studi kasus tertentu yang melibatkan konflik-konflik besar. Demikian pula, penelitian tentang perang proksi sering kali berpusat pada sponsor negara terhadap kelompok bersenjata non-negara, dengan perhatian yang terbatas pada peran aktor korporat seperti PMC. Selain itu, sebagian besar penelitian meneliti PMC atau perang proksi sebagai fenomena yang terpisah, tanpa mengintegrasikannya dalam kerangka yang strategis dan lebih luas seperti intervensi ofensif atau defensif. Terdapat kesenjangan yang nyata dalam literatur mengenai bagaimana PMC berfungsi sebagai instrumen dalam dinamika perang proksi, terutama ketika dinilai melalui lensa tujuan strategis di balik intervensi. Secara khusus, masih belum dieksplorasi apakah penggunaan PMC dalam hal proksi mencerminkan postur defensif atau strategi ofensif. Studi ini diharapkan membantu untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran PMC dalam konflik proksi melalui kerangka teori ofensif dan defensif.

Penelitian terdahulu dimulai dari Elena Pokalova memberikan pemahaman dasar tentang operasional grup Wagner di Afrika, Elena menggambarkan keselarasan strategi Wagner dengan kebijakan luar negeri Rusia. Grup wagner yang mampu berfungsi dengan baik memungkinkan Rusia untuk memberikan pengaruh tanpa terlibat secara langsung, sehingga Rusia bisa lebih baik dalam menyangkal jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Model dari operasional ini memang menantang pandangan tradisional yang pada umumnya berpusat

kepada negara dalam hubungan internasional. Kegiatan grup Wagner yang berfokus kepada ekstraksi sumber daya, stabilisasi politik dan pelatihan militer terutama di Republik Afrika Tengah. Tujuan di dalam operasi tidak hanya untuk kepentingan ekonomi Rusia, namun juga ambisi geopolitik Rusia yang luas, karena Rusia menginginkan dunia multipolar daripada dunia yang cenderung pada barat. Pokalova juga menggunakan studi kasus untuk menggambarkan kompleksitas keterlibatan Wagner dalam berbagai konflik di Afrika. Di dalam penelitiannya, Pokalova menggunakan konsep *Quasi-State* aktor, yang mengartikan bahwa Wagner merupakan ekstensi dari Rusia namun, Rusia juga bisa menggunakan *plausible deniability* (Pokalova, 2023).

Goodison juga menganalisis aktivitas Rusia yang dinilai sebagai eksploitasi dengan kedok intervensi. Goodison juga menyoroti bagaimana Rusia memanfaatkan ketidakstabilan negara untuk memajukan agendanya sendiri. Makalah ini menempatkan keterlibatan Rusia dalam konteks yang lebih luas dari pasca kolonial dan konflik yang sedang berlangsung di Republik Afrika Tengah, membuat negara ini rentan terhadap pengaruh eksternal. Beberapa tema muncul dari literatur seperti, pendekatan Rusia dicirikan sebagai bentuk intervensi “negara semu”, dimana Rusia beroperasi melalui saluran resmi dan tidak resmi untuk memberikan pengaruh. Hal ini mencakup penyediaan senjata dan pelatihan militer kepada pemerintah Republik Afrika Tengah. Ditambah lagi dugaan hubungan dengan kelompok-kelompok pemberontak yang memungkinkan Rusia untuk memainkan berbagai sisi konflik. Lalu adanya motivasi ekonomi di balik keterlibatan Rusia ditekankan, terutama kepentingannya terhadap sumber daya alam yang besar seperti emas dan berlian (Goodison, 2019)

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji pertanyaan utama yaitu **“Bagaimana Peran Wagner dalam Perang Proxy di Republik Afrika Tengah Tahun 2018-2023?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu, sebagai bentuk pemenuhan skripsi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kontraktor militer swasta yang didukung oleh negara untuk beroperasi di zona konflik dan menjelaskan keterlibatan Wagner Group di Republik Afrika Tengah sebagai proksi Rusia maupun Republik Afrika Tengah.

1.4 Kerangka pemikiran

1.4.1 *Private Military Company*

Perusahaan Militer Swasta (PMC) telah menjadi semakin menonjol dalam lingkungan konflik kontemporer. Didefinisikan sebagai perusahaan swasta yang terdaftar secara hukum yang menyediakan layanan militer dan keamanan, PMC beroperasi di bawah kontrak formal dan menawarkan berbagai layanan mulai dari dukungan strategis dan logistik hingga keterlibatan langsung dalam operasi bersenjata. Tidak seperti tentara bayaran tradisional, PMC diintegrasikan ke dalam strategi negara atau non-negara melalui pengaturan hukum dan komersial. Kemunculan mereka mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam privatisasi perang, di mana negara dan aktor mencari alternatif yang fleksibel, dapat disangkal, dan menghemat biaya jika dibandingkan oleh militer tradisional.

PMC muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan keamanan tertentu, seringkali selama periode ketidakstabilan, konflik atau kurangnya militer. Dengan privatisasi jasa keamanan negara bisa menghemat pengeluaran untuk pasukan militer tradisional dan juga fleksibel. Kondisi politik yang tidak stabil dan ekonomi membuat berkurangnya anggaran untuk pertahanan. Maka dari itu solusi yang bisa diambil adalah dengan menyewa militer swasta. Ketersediaan personel yang berpengalaman, termasuk mantan tentara dan pakar keamanan,

memfasilitasi pembentukan dan pertumbuhan PMC di lingkungan yang rawan konflik. PMC digunakan untuk berbagai alasan strategis, ekonomi dan politik. Salah satu keunggulan utama mereka adalah fleksibilitas, karena mereka dapat cepat dikerahkan tanpa kendala birokrasi militer negara. Selain itu dengan menyewa PMC memungkinkan para aktor untuk mengurangi resiko politik dengan mengalihkan operasi militer kepada swasta, yang berarti bisa menghindari akuntabilitas tindakan yang diambil di zona konflik. Secara ekonomi, PMC menawarkan solusi hemat dengan menyediakan layanan khusus tanpa komitmen keuangan jangka panjang yang diperlukan untuk mempertahankan pasukan tetap. Kemampuan mereka untuk beroperasi di lingkungan yang kompleks dan berisiko tinggi membuat mereka menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari kemampuan militer di luar struktur negara tradisional (Hoffman, n.d.). PMC menyediakan berbagai layanan, bantuan bersenjata, intelijen, pelatihan militer dan dukungan operasional. Keterlibatan mereka dalam konflik dapat bervariasi dari operasi keamanan defensif hingga peran tempur aktif (ditambah penjelasan) tergantung pada perjanjian kontrak. Namun, kehadiran mereka menimbulkan masalah hukum dan etika, karena peraturan internasional yang mengatur PMC masih belum konsisten. Pertanyaan tentang akuntabilitas, pengawasan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional terus membentuk perdebatan tentang legitimasi mereka dan potensi konsekuensi dari perang yang diprivatisasi. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, PMC tetap menjadi fitur utama dalam konflik modern, mengadaptasi peran mereka untuk memenuhi tuntutan perang dan keamanan yang terus berkembang. PMC mewakili evolusi yang signifikan dalam peperangan modern, menawarkan alternatif bagi operasi militer tradisional yang dipimpin oleh negara. Peran mereka dalam Perang Proksi menyoroti meningkatnya privatisasi konflik dan pergeseran dinamika keterlibatan militer. Meskipun mereka memberikan keuntungan strategis, penggunaannya juga menimbulkan pertanyaan hukum, politik, dan etika yang kompleks.

Memahami fungsi dan dampak PMC sangat penting untuk menganalisis keberadaan mereka yang semakin meningkat dalam keamanan global dan manajemen konflik (Hoffman, n.d.).

PMC digunakan dalam konflik karena beberapa alasan, terutama kemampuan mereka untuk menyediakan militer, dukungan logistik, dan fleksibilitas operasional, tanpa harus melibatkan negara/ pemerintah secara langsung. Dengan adanya PMC, aktor bisa mengurangi resiko politik, dan hukum yang terkait dengan intervensi militer. PMC juga menawarkan keamanan, pelatihan dan penasihat yang strategis. Sifat dari PMC yang berjalan dengan kontrak membedakan mereka dari proksi tradisional. Perusahaan Militer Swasta (PMC) telah menjadi aktor penting dalam perang kontemporer, beroperasi di berbagai zona konflik secara global (Konstantin Kurilev, 2017);(Sukhankin Sergey, 2018). Perusahaan-perusahaan ini menawarkan kepada negara-negara kemampuan untuk melakukan *outsourcing* operasi militer, menyediakan keterampilan taktis dan teknis sambil memungkinkan penyangkalan yang masuk akal (Sukhankin Sergey, 2018). PMC telah berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar, hadir di lebih dari 50 negara dan mampu berperang atas nama negara (Sukhankin Sergey, 2018). Namun, keterlibatan mereka menimbulkan kekhawatiran akan destabilisasi keamanan, pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah akuntabilitas (Sarjito Aris, 2023). Lanskap hukum dan peraturan untuk PMC bervariasi, dengan upaya untuk memberikan pengawasan melalui konvensi internasional dan legislasi nasional (Sarjito Aris, 2023). Penggunaan PMC juga memiliki implikasi geopolitik, yang berpotensi mempengaruhi kedaulatan negara dan dinamika kekuatan regional (Sarjito Aris, 2023).

Perusahaan militer dan keamanan swasta (PMSC) memainkan peran yang semakin signifikan di wilayah dengan struktur tata kelola yang lemah, terutama dalam kaitannya dengan eksploitasi sumber daya alam. PMSC sering kali dipekerjakan oleh investor asing untuk memitigasi risiko di negara-negara yang terkena dampak konflik yang kaya akan sumber daya alam (Vanhonnaecker Lukas, 2019). Tren ini berimplikasi pada pembangunan ekonomi dan hak

asasi manusia, sehingga perlu adanya perbaikan regulasi (Vanhonnaeker Lukas, 2019). Beberapa PMSC telah terlibat langsung dalam operasi akuisisi sumber daya di wilayah berkembang yang kaya akan sumber daya, yang berpotensi mengancam kelangkaan sumber daya dan tata kelola di masa depan (Howells Olivia, 2023). Keterlibatan PMSC di negara lemah dapat meningkatkan efektivitas militer tetapi juga meningkatkan keparahan konflik, tergantung pada layanan yang diberikan dan kondisi pasar (Petersohn Ulrich, 2017). Meskipun PMSC memungkinkan negara untuk mengalihdayakan fungsi keamanan, aktivitas mereka di negara-negara lemah dapat merusak kedaulatan negara (Nebolsina Maria A, 2019). Meningkatnya pengaruh PMSC di wilayah yang kaya sumber daya dan memiliki pemerintahan yang buruk menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dan regulasi terhadap operasi mereka.

Dengan peran Perusahaan Militer Swasta yang terus berkembang di dalam konflik modern, terkadang membuat perusahaan tersebut memiliki fungsi lain yang tentunya melampaui kontrak militer yang konvensional ditambah dengan hukum yang cenderung fleksibel, PMC yang terus berevolusi hingga menjadi kurang lebih seperti proksi dalam konflik bersenjata. Dengan berkembangnya PMC, maka dari itu kita mengerti bahwa terdapat tren tentang privatisasi perang. Namun tentu dengan keterlibatan PMC, terkadang bisa mencerminkan strategi yang lebih luas. Dalam sebagian kasus, banyak PMC yang diluncurkan di suatu tempat untuk menstabilkan kondisi politik, membantu regime yang sedang terancam, memperbaiki sekuriti internal, yang lebih mencerminkan orientasi defensif, yang hanya membantu memperkuat atau mempertahankan kekuatan yang sudah ada dan dengan skenario yang lain, PMC yang dipekerjakan untuk mengejar kekuatan atau pengaruh sehingga bisa mendapatkan posisi yang diinginkan menggambarkan orientasi ofensif (Noori Alireza & Masoudi Heidarali, 2025), (Singer, 2001) juga mempunyai sistem klasifikasi yang menunjukkan bahwa Perusahaan Militer Swasta biasanya menyediakan bantuan militer taktis langsung dan juga mencakup berpartisipasi dalam pertempuran garis depan. (Fulloon, 2020) juga mengatakan

hal yang sama dalam penelitiannya, Fullon menegaskan bahwa Perusahaan Militer Swasta menggunakan serangan tempur untuk membantu klien mereka untuk mempertahankan atau memulihkan ketertiban politik dan kekuatan militer. Dan (McFate Sean, 2014) yang juga beranggapan bahwa Perusahaan Militer Swasta sudah menjadi bagian yang integral dari strategi militer ofensif terutama di lingkungan yang kompleks di mana pasukan militer tradisional menghadapi batasan politik atau operasional. Dengan hal ini PMC memperkenalkan dimensi ini akan membantu dalam mengetahui kepada siapa PMC bekerja.

Dalam konflik kontemporer, istilah agen ganda digunakan untuk menggambarkan entitas yang mempunyai peran ganda dalam satu wilayah operasi sementara mengejar tujuan yang terpisah dan sering kali disembunyikan. PMC dapat dikontrak untuk mendukung pemerintah tuan rumah dengan menawarkan layanan seperti pelatihan militer, menjaga fasilitas negara dimana ia beroperasi. Selain itu PMC juga bisa mengejar agenda geopolitik dan ekonomi yang lebih luas. Dalam kerangka ini konsep agen ganda menjembatani kesenjangan antara lensa defensif dan ofensif dan logika struktural perang proksi (Mearsheimer John J. & Rosato Sebastian, 2023).

Penggunaan strategis PMC sering kali terjadi dalam konflik yang lebih luas dimana aktor eksternal tidak ingin memberi pengaruh tanpa konfrontasi langsung. Salah satunya adalah dalam perang proksi, dimana ada bentuk keterlibatan tidak langsung dimana suatu pihak mendukung aktor lain untuk mencapai tujuan strategisnya. Dengan menggunakan PMC, maka logika dari perang proksi selaras, aktor akan menggunakan pasukan yang sudah dikontrak untuk mengejar tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini PMC tidak hanya menjalankan peran operasional tetapi juga berfungsi sebagai instrumen dalam hubungan proksi, mengaburkan batas antara perusahaan swasta dan strategi yang selaras dengan negara yang merekrutnya.

1.4.2 *Proxy War*

Perang proksi merupakan bentuk konflik modern yang canggih dan semakin lazim, di mana negara-negara dan aktor-aktor kuat mengejar tujuan strategis melalui cara-cara tidak

langsung. Pada intinya, perang proksi melibatkan dukungan, mempersenjatai dan memandu kelompok pihak ketiga secara strategis untuk bertempur atas nama aktor utama, tanpa aktor tersebut secara langsung terlibat dalam pertempuran. Dalam bentuk konflik yang kompleks ini, negara mengetahui entitas berpengaruh dengan senjata memilih untuk beroperasi melalui perantara seperti milisi lokal, kelompok pemberontak, atau aktor non-negara bersenjata lainnya daripada mengerahkan kekuatan militer mereka sendiri (Wither, 2020). Pendekatan ini menawarkan beberapa keuntungan penting seperti memberikan alasan penyangkalan yang masuk akal, mengurangi resiko militer dan politik secara langsung dan juga memungkinkan manipulasi strategis terhadap dinamika konflik dengan keterlibatan yang minimal. Strategi dasar perang proksi bergantung pada identifikasi dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang telah memiliki motivasi yang selaras dengan tujuan aktor utama. Dengan menyediakan sumber daya, pelatihan intelijen atau dukungan keuangan, aktor-aktor kuat ini dapat secara efektif memperluas jangkauan geopolitik mereka sambil mempertahankan lapisan non intervensi. Tidak seperti perang tradisional, dimana konflik ditandai dengan konfrontasi militer langsung, perang proksi beroperasi menggunakan keterlibatan pihak ketiga. Perang proksi mengubah medan perang menjadi jaringan hubungan yang kompleks, di mana keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan militer, tetapi juga pada manuver politik yang canggih, komunikasi strategis, dan kemampuan untuk mempengaruhi aktor non negara (Wither, 2020).

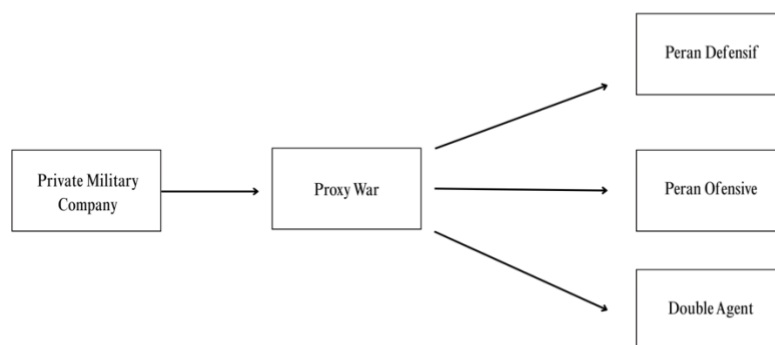
Seiring dengan pergeseran konflik global, kemampuan teknologi, dan strategi militer, demikian pula metode pelaksanaan perang melalui pihak ketiga. Perang Proksi telah mengalami transformasi yang signifikan, berevolusi dari manifestasi awal berupa dukungan tidak langsung untuk kelompok-kelompok bersenjata, hingga operasi secara tidak terang-terangan, dengan perlengkapan dan alat yang canggih. Perang proksi kontemporer telah berkembang melampaui dukungan militer tradisional, dan kini menggabungkan beragam strategi seperti tekanan ekonomi, operasi siber yang canggih serta jaringan pengaruh strategis

yang kompleks. Meningkatnya ketergantungan pada kekuatan pihak ketiga telah menciptakan jaringan hubungan strategis yang rumit yang menantang pemahaman konvensional tentang perang. Ketika perang proksi menjadi lebih beragam, menimbulkan pertanyaan kritis tentang akuntabilitas, sejauh mana kontrol yang dipegang oleh aktor utama, implikasi etika dan intervensi militer tidak langsung.

Di antara berbagai bentuk proksi, Perusahaan militer swasta telah muncul sebagai alternatif yang berbeda dan terstruktur dari kelompok-kelompok bersenjata tradisional. Tidak seperti proksi informal atau yang digerakkan oleh ideologi, PMC beroperasi sebagai bisnis yang terdaftar secara hukum yang menyediakan jasa militer berdasarkan kontrak. Dengan kehadiran mereka dalam konflik modern mencerminkan pergeseran ke arah privatisasi operasi militer, di mana peperangan semakin di pengaruhi oleh kepentingan komersial (Kozera et al., 2020)

1.5 Sintesa pemikiran

Berdasarkan latar belakang hingga kerangka berpikir yang telah disusun oleh penulis, maka terbentuklah sintesa pemikiran:



Ketergantungan yang meningkat pada Perusahaan Militer Swasta (PMC) dalam konflik kontemporer tidak hanya mengubah pelaksanaan peperangan tetapi juga memperdalam

kompleksitas keterlibatan eksternal. Meskipun PMC menawarkan keuntungan operasional seperti dapat menyangkal, keterampilan khusus, dan dapat menyebar dengan cepat penggunaannya sering kali mencerminkan tujuan strategis yang lebih luas. Dilihat melalui kerangka motivasi defensif dan ofensif, PMC dapat digunakan untuk melindungi tatanan politik yang ada atau, sebagai alternatif, untuk memproyeksikan pengaruh dan membentuk kembali dinamika konflik. Pada saat yang sama, keterlibatan mereka sejalan dengan logika perang proksi, di mana para aktor mengejar keterlibatan tidak langsung untuk mempengaruhi hasil tanpa memberi wewenang secara langsung. Tidak seperti proksi informal atau proksi yang digerakkan oleh ideologi, PMC beroperasi di bawah kontrak formal dan struktur hukum, namun memiliki fungsi strategis yang sebanding dengan memperluas jangkauan, meminimalkan akuntabilitas, dan mengelola risiko operasional. Dalam banyak kasus, posisi mereka menyerupai “agen ganda” yang berarti secara formal bersekutu dengan satu pihak namun beroperasi dengan cara yang pada akhirnya melayani kepentingan strategis pihak lain. Integrasi kekuatan yang diprivatisasi, tujuan strategis ganda, dan eksekusi tidak langsung ini menggarisbawahi bagaimana konflik modern dibentuk tidak hanya oleh ambisi geopolitik tetapi juga oleh instrumen yang dipilih untuk mengejar ambisi itu dengan menempatkan PMC di persimpangan antara perang yang sudah terjadi dan dialihdayakan dengan keterlibatan proksi.

1.6 Argumen Utama

Keterlibatan Wagner di Republik Afrika Tengah menjadi contoh peran dari Perusahaan Militer Swasta yang bertindak sebagai agen ganda dalam dinamika perang proxy. Meskipun secara resmi bertindak atas nama pemerintah Republik Afrika Tengah untuk memberikan bantuan keamanan, Wagner sekaligus mempromosikan kepentingan strategis dan ekonomi Rusia. Di satu sisi, Wagner mengambil peran defensif dengan membantu pemerintah Republik Afrika Tengah. Menstabilkan lingkungan politiknya yang rapuh, memberikan pelatihan

militer, melindungi pejabat tinggi dan berkontribusi pada keamanan internal. Tindakan ini dilakukan dengan upaya mempertahankan kedaulatan negara dan memulihkan ketertiban politik. Namun peran defensif ini menyimpan strategi ofensif. Wagner dilaporkan telah mengamankan kendali atas wilayah-wilayah kaya sumber daya, mengeliminasi aktor-aktor yang menghalangi upaya eksploitasi, dan memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam yang berharga seperti emas dan berlian. Operasi-operasi ini memprioritaskan pengaruh Rusia jangka panjang dan keuntungan ekonomi di atas kedaulatan Republik Afrika Tengah. Dengan menyamarkan intervensi ofensif dengan dukungan defensif, Wagner berfungsi sebagai agen ganda dengan mendukung kepentingan pemerintah Republik Afrika Tengah dan sponsor.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan populasi atau sebuah fenomena yang sedang diteliti. Sehingga fokus utama dari penelitian ini adalah objek penelitiannya. Melalui tipe penelitian deskriptif penulis hendak mengumpulkan informasi aktual secara terperinci (Sugiyono, 2018)

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai ketika Wagner diutus untuk melakukan operasi militer di Afrika Tengah pada 2018 dan hingga 2023. Karena pada tahun 2018, dimulainya Wagner beroperasi setelah Republik Afrika Tengah meminta pertolongan kepada Rusia, dan berhenti pada tahun 2023 karena kematian yevgeny prigozhin pada 23 agustus 2023.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen. Menurut (Nilamsari Natalina, 2014), menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental yang sudah berlalu.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Data Analisis dokumen adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan tinjauan dan interpretasi sistematis terhadap teks-teks yang ada, seperti laporan, kebijakan, surat kabar, dan konten digital (Morgan Hani, 2022)

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab yang disusun secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman mengenai perkembangan alur dari penelitian ini. Sistem penulisannya dibagi sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, arguman utama, dan metodologi penelitian dalam menjelaskan Bagaimana Wagner grup bertindak sebagai proksi bagi Rusia dan Republik Afrika Tengah.

Bab II Menganalisis peran Wagner dalam perang proksi di konflik Republik Afrika Tengah pada tahun 2018 hingga 2023 menggunakan konsep motivasi defensif, lalu juga bagaimana Wagner mendukung stabilitas rezim.

Bab III Menganalisis peran Wagner dalam konflik Republik Afrika Tengah dari kedatangan pada tahun 2018 hingga 2023 dengan menggunakan konsep motivasi ofensif, lalu juga menganalisis bagaimana Wagner beroperasi dalam kerangka perang proksi dan mengeksplorasi fungsi gandanya dengan dinamika agen ganda.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran terkait topik yang telah di bahas